

**PERAN DINAS PARIWISATA DIY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERDASARKAN PARADIGMA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah**



disusun oleh:

NIKEN SETYAWATI

19610080

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “AMPD”
YOGYAKARTA
2022**

PENGESAHAN

PERAN DINAS PARIWISATA DIY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERDASARKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TESIS

Oleh :
NIKEN SETYAWATI
19610080

Disahkan oleh Tim Penguji

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)

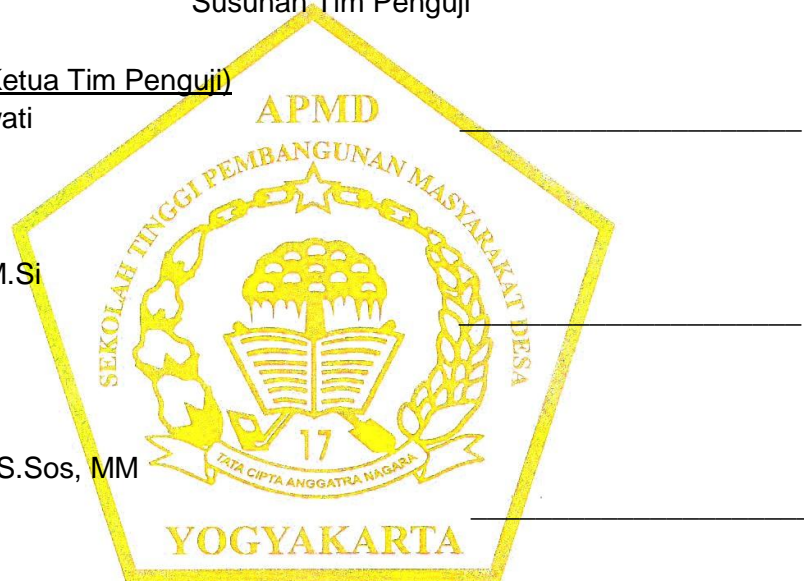
Dr. Yuli Setyowati

Penguji I

Dr. Supardal, M.Si

Penguji II

Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM



Yogyakarta,
Mengetahui
Direktur Program Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Niken Setyawati

NIM : 19610080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **Peran Dinas Pariwisata DIY Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan** adalah karya saya sendiri. Hal-hal bukan karya saya dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Yogyakarta, 30 Juni 2022

Yang membuat Pernyataan

Niken Setyawati
NIM : 19610080

MOTTO

"Kekayaan tidak berasal dari banyak hal baik duniawi tetapi dari pikiran yang puas." (Nabi Muhammad Saw)

"Biarapun seribu kapal tenggelam di lautan. Namun, cita-cita manusia tidak pernah padam." (Buya Hamka)

"Pengaruh suatu teladan yang baik jauh lebih bermanfaat daripada suatu teguran yang tajam" (Sri Sultan Hamengkubowono VIII)

"Melalui kebudayaan, diharapkan sisi-sisi humanisme mahasiswa akan dibangkitkan sehingga tidak menjadi robot-robot ilmu pengetahuan dan teknologi" (Koesnadi Hoerdjosoemantri)

"Yogyakarta adalah kota pungut, mrenghasilkan para pemimpin bangsa Indonesia" (Motinggo Busye)

"Apa yang kita ucapkan akan hilang, apa yang kita tulis akan abadi" (Niken Setyawati)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Untuk yang suamiku yang terkasih Joko Santoso,
Anakku tersayang Dyah Ayu Setyo Murti, Azahra Shaksabila,
Galih Satrio Pambudi,
Orang tuaku yang amat aku kasihi
Pelajaran kejujuran terus aku lakukan sampai saat ini
Ayah, terimakasih atas dukungannya selama ini. Denganmu aku
nelajar tentang ketulusan dan keikhlasan yang tiada batas
Pengertianmu dan pengorbananmu selama ini sungguh sangat
berarti bagi perjalanan karier
Tiada kata yang terucap selain terimakasih ayah atas
kesempatan yang diberikan
Anak-anakku yang sangat aku sayangi terimakasih atas
pengertiannya
Hingga kini kalian membuatku terus berdegup
Dalam angan, asa, ataupun cita yang kuhirup
Terima kasih
Yogyakarta, Junu 2022
Dari yang Terus berjuang
Niken Setyawati**

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang oleh karenanya tesis dengan judul **PERAN DINAS PARIWISATA DIY DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERDASARKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** dapat diselesaikan. Rahmat, ridha dan pertolongannya merupakan sebuah kekuatan dan karunia yang tidak terhingga dalam penyelesaian tesis. Karya ini adalah persyaratan untuk lulus dan memperoleh derajat atau gelar master pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Tentu dalam menyelesaikan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dorongan, dan doa dari banyak pihak. Maka, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Yuli Setyowati selaku dosen pembimbing yang telah amat sangat sabar, memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyelesaian Tesis ini.
3. Direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Dr. Supardal, M.Si.
4. Tim Penguji, Dr. Supardal, M.Si dan Dr.Sugiyanto, S.Sos, MM selaku tim penguji yang telah memberikan kritikan dan motivasi dalam proses pembuatan tesis ini.
5. Pengelola, dosen dan tenaga pendidik program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa

“APMD” Yogyakarta yang selama saya menempuh pendidikan terus membantu, membimbing dan juga memberikan arahan.

6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemberdayaan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta angkatan 24, yang selama menempuh pendidikan selalu kompak dan saling mendukung satu sama lainnya. Semoga rekan-rekan semakin sukses kedepannya.
7. Mas Junior, Mbak Amanda dan Gufron sahabat, teman dan juga anakku yang selalu mendukung, saran, masukan sekaligus memberi semangat di saat sudah mulai putus asa trimakasih untuk semuanya.
8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian tesis saya, baik secara moril ataupun materi.

Yogyakarta, Juni 2022

Niken Setyawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR FOTO	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Fokus Penelitian.....	13
C Rumusan Masalah.....	13
D Tujuan Penelitian.....	14
E Kerangka Konseptual.....	14
a. Peran Pemerintah Daerah.....	14
b. Implementasi Kebijakan Publik.....	20
c. Kebijakan Pembangunan Pariwisata.....	22
d. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.....	26
F. Metode Penelitian.....	29
a. Jenis Penelitian.....	29
b. Obyek Penelitian.....	30
c. Subyek Penelitian.....	30
d. Lokasi Penelitian.....	30
e. Teknik Pemilihan Informan.....	31
f. Teknik Pengumpulan Data.....	32
g. Teknik Analisa Data.....	36
h. Keabsahan data.....	37
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	39
A Profil Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	39
B Profil Dinas Pariwisata DIY.....	43

BAB III ANALISA TENTANG PERAN DINAS PARIWISATA DAERAH YOGYAKARTA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERDASARKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	65
A PERAN DINAS PARIWISATA DAERAH YOGYAKARTA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERDASARKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	65
1 Peran Koordinasi.....	66
2 Peran Sebagai Perencana.....	68
3 Peran Sebagai Pembuat kebijakan (Undang-Undang dan Regulasi).....	70
4 Peran Sebagai Pengusaha (<i>Enterprenuer</i>).....	75
5 Peran Stimulasi (<i>stumilation</i>).....	80
6 Peran Pariwisata sosial (<i>Social Tourims</i>).....	85
7 Peran sebagai Daya Tarik Publik (<i>Public Interst</i>).....	89
B ANALISA DATA PERAN DINAS PARIWISATA DAERAH YOGYAKARTA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA BERDASARKAN PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	92
1 Peran Koordinasi.....	92
2 Peran Sebagai Perencana.....	98
3 Peran Sebagai Pembuat Kebijakan (Undang-Undang dan Regulasi).....	102
4 Peran Sebagai Pengusaha (<i>Enterprenuer</i>).....	109
5 Peran Stimulasi (<i>stumilation</i>).....	116
6 Peran Pariwisata sosial (<i>Social Tourims</i>).....	125
7 Peran sebagai Daya Tarik Publik (<i>Public Interst</i>).....	130
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	134
A KESIMPULAN	134
B SARAN	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan dan Jabatan.....	31
Tabel 2 Jumlah Obyek Wisata Di Yogyakarta	41
Tabel 3 Program Kerja Dinas Pariwisata DIY Tahun 2021.....	58
Tabel 4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Parwisata DIY tahun 2021.....	78

DAFTAR FOTO

Foto 1 Rapat kerja pejabat eselon Dinas Pariwisata DIY dengan DPRD DIY bulan Maret 2021.....	73
Foto 2 Kegiatan forum diskusi masyarakat Desa Bejiharjo, Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.....	93
Foto 3 Pelaksanaan rapat koordinasi dengan masyarakat Desa Bejiharjo Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.....	93
Foto 4 Kegiatan Table Top yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sebagai Bentuk koordinas dan kolaborasi dengan ASITA DIY	96
Foto 5 Kegiatan Bali Beyond Travel Mart yang dilakukan oleh Pelaku Wisata DIY.....	96
Foto 6 Launching Calender Of Event Oleh Kepala Dinas Pariwisata	97
Foto 7 Sambutan Kepala Dinas Pariwisata DIY dalam Launching Calender Of 2021 sebagai bukti keberlangsungan kegiatan pariwisata DIY melalui Peran koordinasi	97
Foto 8 Kunjungan lapangan sebagai bagian dari kegiatan perencanaan dan Pembuatan DED di Desa Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul	99
Foto 9 Kegiatan pemaparan rencana kerja Dinas Pariwisata DIY.....	101
Foto 10 Dokumen DPA Dinas Pariwisata DIY yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan	101
Foto 11 Pemaparan RIPPDA DIY di DPRD DIY	105
Foto 12 Kegiatan Sosialisasi Pergub POKDARWIS	109
Foto 13 Pembangunan papan petunjuk obyek wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY dengan ijin dari Dinas Perhubungan	110
Foto 14 Kunjungan dalam rangka pembuatan sarana dan prasarana jalan di Desa Budaya Gayam Harjo	111
Foto 15 Peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana di Umbul Beji, Kalurahan Beji Harjo, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul	111
Foto 16 Sosialisasi Aplikasi Visiting Jogja.....	113

Foto 17 Lomba foto selfie yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY.....	114
Foto 18 Kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY.....	115
Foto 19 Berbagai upaya untuk menarik perhatian wisatawan melalui busana Terutama untuk wisatawan mancanegara melalui pesona batik.....	115
Foto 20 Kegiatan pelatihan desa/kampung wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY dalam rangka meningkatkan layanan kepada Wisatawan	117
Foto 21 Kegiatan FGD kemitraan Forum Komunikasi Desa Wisata di DIY.....	119
Foto 22 Penandatanganan Nota Kesepakaaan Kepala Dinas Pariwisata DIY, GIPI, ASITA, dan Forkom desa wisata.....	119
Foto 23 Homestay di Desa Wisata PentingSari yang segera berstandar dunia	120
Foto 24 Desa Wisata Pentingsari masih mempertahankan rumah sebagai Homestay sesuai dengan kearifan lokal	120
Foto 25 Homestay di Desa Wisata Nglangeran masih mempertahankan kearifan Lokal	121
Foto 26 Desa Wisata Nglenggeran Meraih Penghargaan ASEAN Sustainable Award.....	122
Foto 27 Desa Wisata Pentingsari menerima Sertifikat dari Kemenparekrat RI tahun 2020.....	126
Foto 28 Sertifikasi Desa Wisata Nglanggeran.....	127
Foto 29 Pendampingan desa/kampung wisata.....	128
Foto 30 Pembangunan sarana prasarana penunjang wisata di desa/kampung Wisata.....	128
Foto 31 Pemanfaatan lahan untuk pertanian kokoa di Nglanggeran.....	129
Foto 32 Pelantikan Saka Pariwisata.....	131
Foto 33 Kegiatan Saka Pariwisata Provinsi melaksanakan kampanye sadar Wisata di Malioboro.....	132

Abstrak

Dalam tesis ini dilakukan penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pembangunan wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan lebih berkembang dan maju, di beberapa daerah dapat memberikan dampak yang positif dalam perekonomian terutama dalam pemasukan devisa. Pembangunan kepariwisataan di DIY dinilai telah muncul, meski pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak mudah lantaran belum semua lapisan masyarakat memahami pentingnya pariwisata, pembangunan kepariwisataan berkelanjutan sangat tergantung pada seberapa besar peran pemerintah daerah dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Kekuatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah kearifan lokalnya, Dinas Pariwisata DIY dalam melakukan kebijakan pariwisata sudah berpijak pada kearifan lokal ini dengan melakukan berbagai peran sebagai organisasi publik yaitu koordinasi, perencanaan (*planning*), Undang-undang (*legislation dan regulation*), Peran Sebagai Pengusaha (*enterpreneur*), Stimulasi (*stimulation*), Peran sebagai Pariwisata Sosial (*Social tourism*), Peran Sebagai daya tarik (*Public interest*).

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi atau pengamatan terhadap arsip-arsip yang dihasilkan dari kegiatan Dinas Pariwisata DIY berupa laporan kegiatan, hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY LAKIP, RENSTRA, makalah dan power point yang digunakan oleh Pejabat eselon ketika menjalankan tugasnya sebagai narasumber, dan juga pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat eselon IV dan III melalui aplikasi SENGGUH yang dimiliki oleh BAPPEDA DIY, Dalam melakukan observasi dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang dibutuhkan di Unit kearsipan, Subbag Program, Seksi dan Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata DIY. Dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu.

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting. **Pertama**, Dinas Pariwisata DIY terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan berbasis pada community based tourism **Kedua**, Dinas Pariwisata DIY telah melakukan perannya sebagai organisasi publik yang diberi tugas untuk melakukan perannya yaitu koordinasi, perencanaan (*planning*), Undang-undang (*legislation dan regulation*), Peran Sebagai Pengusaha (*enterpreneur*), Stimulasi (*stimulation*), Peran sebagai Pariwisata Sosial (*Social tourism*), Peran Sebagai daya tarik (*Public interest*).

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

In this thesis, research is conducted on the role of local government in this case the DIY Tourism Office in carrying out tourism development with a sustainable development paradigm. Tourism development has a very important role in regional development. With the existence of various tourism activities, areas that have basic tourism potential will be more developed and developed, in some areas can have a positive impact on the economy, especially in foreign exchange earnings. Tourism development in DIY is considered to have emerged, although sustainable tourism development is not easy because not all levels of society understand the importance of tourism, sustainable tourism development is highly dependent on how big the role of the regional government is and is also supported by community participation in supporting this activity in the context of implementing development. Strengths in the Special Region of Yogyakarta in implementing sustainable development are local wisdom, the DIY Tourism Office in carrying out tourism policies has been based on this local wisdom by carrying out various roles as public organizations, namely coordination, planning (planning), laws (legislation and regulation), Role as entrepreneur (entrepreneur), stimulation (stimulation), role as social tourism (social tourism), role as attraction (public interest).

This qualitative research uses data collection techniques using the methods of observation, documentation and interviews. In conducting observations or observations of the archives generated from the activities of the DIY Tourism Office in the form of activity reports, the results of studies carried out by the DIY LAKIP Tourism Office, RENSTRA, papers and power points used by echelon officials when carrying out their duties as resource persons, and also reporting of activities carried out by echelon IV and III officials through the SENGGUH application which is owned by BAPPEDA DIY. Observations are carried out by looking for materials needed in the Archives Unit, Program Subdivision, Section and Field within the DIY Pariwisata Service. Interviews were conducted with informants with a list of questions that had been prepared in advance.

This research found several important things. First, the DIY Tourism Office continues to be committed to carrying out sustainable tourism development based on community based tourism. Second, the DIY Tourism Office has carried out its role as a public organization tasked with carrying out its roles, namely coordination, planning (planning), laws (legislation and regulation), Role as Entrepreneur, Stimulation, Role as Social Tourism (Social tourism), Role as attraction (Public interest).

Keywords: Role of Government, Sustainable Development, Community Participation.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai suatu bangsa yang mengikat diri di dalam bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan pembangunan perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinaminator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam Penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional di mulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa-kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi, sampai nasional, dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 45 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan

budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut : (1) secara politik demokrasi telah berjalan, (2) secara sosial terjadi peranserta aktif masyarakat, (3) secara ekonomi, mekanisme pasar berperan (*market work mechanism*), (4) secara hukum berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*) (www.bappenas.go.id).

Proses pembangunan di Indonesia merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dikenal dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara meliputi Indonesia adalah negara hukum, sistem konstitusional, kekuasaan tertinggi dijalankan oleh MPR, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR, presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, menteri negara adalah pembantu presiden, dan kekuasaan negara tidak tak terbatas. Kelembagaan penyelenggara negara di Indonesia berdasarkan pada tujuh kunci pokok tersebut.

Kelembagaan penyelenggaraan negara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan negara dan mengorganisasikan tugas-tugas pembangunan. Dalam rangka pengorganisasian tugas-tugas pembangunan sesungguhnya peran

pemerintah adalah membantu pelaksanaan pembangunan dengan peran utama (1) membantu mengelola potensi nasional dan global sebagai sumber pembangunan nasional, (2) membantu merumuskan alokasi sumberdaya untuk penyelenggaraan pembangunan nasional, dan (3) mendampingi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan nasional (www.bappenas.go.id).

Pembangunan selalu erat kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk mengoptimalkan pembangunan nasional perlu dilakukan upaya-upaya guna memacu sektor-sektor yang dianggap potensial dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian termasuk diantaranya sektor pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional dan terkait dengan pembangunan sektor – sektor lainnya. Oleh karena itu keberhasilan pariwisata turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam mencapai sasaran Program Pembangunan Nasional, maka sektor pariwisata yang merupakan bagian kebijakan di bidang ekonomi. Dari aspek ekonomi, pariwisata diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa bagi negara, sedangkan dari aspek sos

ial diharapkan dapat melonggarkan himpitan beban ketenagakerjaan. Dan dari aspek politiknya, diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan dari aspek budaya dapat berperan dalam meningkatkan pengenalan apresiasi, pelestarian, dan pengembangan seni budaya Indonesia..

Indonesia merupakan daerah tujuan wisata yang sangat potensial untuk dikerjakan. Indonesia memiliki beranekaragam budaya, adat istiadat,

dan keindahan alam yang tidak dimiliki negara lain. Keberagaman budaya dan keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara mengenal budaya Indonesia sangat beragam dan masyarakat Indonesia yang terkenal ramah-ramah, sehingga wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.

Pariwisata adalah industri yang sangat potensial. Pariwisata saat ini merupakan suatu industri yang sedang berkembang pesat, dalam hal ini pariwisata akan berkembang menjadi salah satu industri yang tumbuh dominan di berbagai belahan dunia. Banyak negara yang mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan dari negaranya, karena sektor pariwisata adalah pembangkit usaha ekonomi potensial, dan pembangkit perekonomian suatu negara, kota, provinsi, kabupaten atau daerah tujuan wisata pegunjung.

Pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata, maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan lebih berkembang dan maju, selain pariwisata di beberapa dapat memberikan dampak yang positif dalam perekonomian, terutama pemasukan devisa.

Ada suatu prinsip penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan, yang semuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan

keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan potensi kekayaan alam dan warisan budaya yang terus dikembangkan sebagai tujuan wisata favorit baik didalam negeri maupun luar negeri, Yogyakarta selalu ramai di setiap musim liburan penuh dengan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sesuai dengan visinya bahwa pembangunan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada pengembangan kepariwisataan berkelanjutan yang berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, dan berkelas dunia. Dengan melalui Dinas Pariwisata DIY, Yogyakarta terus mengembangkan potensi wisata dengan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata DIY (RIPPDA) yang telah ditetapkan dengan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi DIY Tahun 2012 – 2025.

Di dalam RIPPDA tersebut disebut Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah, adapun Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Yogyakarta sebagai Destinasi Pariwisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kepariwisataan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif
- b. Mengembangkan daya tarik wisata berbasis budaya

- c. Meningkatkan daya saing pariwisata pada tingkat nasional maupun global sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan
- d. Mengembangkan tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- e. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara
- f. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan
- h. Mewujudkan masyarakat sadar wisata untuk mendukung terwujudnya sapta pesona.

Sebagai salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia, Yogyakarta menyimpan banyak sekali potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya yang unik dimana didalamnya terkandung nilai-nilai luhur budaya bangsa kearifan lokal yang dapat menunjang kegiatan pariwisata berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konveksi, wisata belanja.

Pada dasarnya kegiatan pariwisata adalah kegiatan menjual lingkungan, orang-orang yang bepergian dari suatu daerah ke daerah

tujuan wisata adalah ingin menikmati lingkungan seperti pemandangan alam, atraksi budaya, arsitektur, makanan dan minuman, benda seni dan lainnya yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di DIY dinilai telah muncul, meski begitu pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak mudah lantaran belum semua lapisan masyarakat memahami pentingnya pariwisata. Pariwisata berkelanjutan menurut UNESCO diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang menghormati masyarakat lokal, para wisatawan, warisan budaya serta lingkungan. Hal tersebut juga ditekankan Menteri Pariwisata (pada waktu itu) Arief Yahya saat ini, bagaimana mengembangkan pariwisata diiringi kesadaran masyarakat melestarikan obyek wisata. Wisata berkelanjutan sangat tergantung pada seberapa besar peran masyarakat dan manfaat bagi masyarakat DIY dengan segala kekayaannya dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri merupakan bentuk upaya pengembangan wisata berkelanjutan. Pelestarian alam berdasarkan pada *community base tourism* merupakan salah satu contoh konkret mengenai pariwisata berkelanjutan. Dimana masyarakat dengan sadar ikut memahami dan melakukan sapta pesona yang pada akhirnya alam akan terjaga dengan baik, budaya terjaga, dan kesejahteraan rakyat meningkat (harianjogja.com, 26 Maret 2019).

Sekarang ini banyak destinasi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah hadir sebagai pengontrol agar perkembangannya, tatanannya sesuai dengan aturan. Penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) tidaklah

mudah karena belum semua masyarakat memahami arti pentingnya pariwisata. Masih terjadinya kepentingan–kepentingan sesaat memenuhi kebutuhan hidup saat ini.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi pembangunan yaitu menjadi destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025, dan saat ini pemerintah daerah DIY tengah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pariwisata secara bertahap dan berkomitmen untuk membangun destinasi wisata dengan prinsip *sustainable development*. Prinsip ini sesuai dengan filosofi *hamemayu hayuning bawono* yang berarti mempercantik alam yang sudah cantik dan hal ini telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah DIY bahwa Hamemayu Hayuning Bawono sebagai salah satu dasar utama agar pengembangan wisata tetap berkelanjutan dan menjaga ekosistem.

Kekuatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pada kearifan lokalnya. Nilai kearifan lokal sangat banyak dan menarik. Untuk itu, Dinas Pariwisata DIY dalam melakukan pembangunan kepariwisataan berpijak pada kearifan lokal tersebut, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dan merasakan pentingnya pariwisata dalam rangka menumbuhkan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan

Selain itu pembangunan pariwisata saat ini memang diarahkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yang terarah pada penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak obyek wisata baik

wisata alam maupun budaya, dan pengembangan pariwisata di DIY sangatlah penting untuk kemajuan daerah karena juga merupakan penyumbang PAD terbesar setelah sektor lainnya.yaitu sektor konstruksi, pertanian pengangkutan dan komunikasi. Karena DIY itu juga dua kekuatan potensi wisata yaitu wisata alam dan budaya yang mempunyai keunikan tersendiri, maka pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar penyelenggaraan kepariwisataan tidak merusak lingkungan, dan juga di DIY mempunyai kearifan dan budaya lokal yang mendukung adanya kelestarian lingkungan.

Kebijakan Pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah masing-masing, misalnya pengembangan sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Tentu saja ini tidak lepas dari peranan pemerintah daerah penerapan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun peranan pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat peranan pemerintah dalam pembangunan pariwisata adalah perencanaan pembangunan dalam hal ini dalam konteks pembangunan pariwisata ini merupakan pondasi awal dalam mengambil peran yang penting dan strategis, Pemerintah daerah merupakan stakeholder yang memiliki peranan yang paling besar

terhadap kemajuan sektor pariwisata yang berdampak pada pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti peran Dinas Pariwisata DIY Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dalam Penelitian ini, penulis memakai beberapa acuan dari hasil penelitian tentang pariwisata yang dilakukan peneliti lainnya, sebagai berikut:

1. Mazfirah T. Idris, Nurul Umiyati dan Zainla Abidin dalam tulisannya yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Jodipan dan Kampung Tridi (Studi Kasus di Kalurahan Jafipan dan Kalurahan Kesatrian Kampung Blimbing Kota Malang)” pada *Jurnal Respon Publik Volume 13*, tahun 2019, hlm. 68-77. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan adalah membangun infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, melakukan promosi, dan membuat *branding*. Persamaan hasil penelitian dari jurnal ini adalah sama-sama meneliti tentang peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini bahwa peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan melakukan membangun infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, melakukan promosi, dan membuat branding. Sedangkan hasil

penelitian yang penulis dapat adalah peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan adalah meliputi 7 peran yaitu peran sebagai koordinator, peran sebagai perencana, peran sebagai pembuat kebijakan atau undang-undang, peran sebagai pengusaha, peran sebagai stimulus atau pendorong, peran sebagai pariwisata social dan peran sebagai daya tarik publik.

2. I Gede Eko Putra Sri Sentanu dan Mahadainsar dalam tulisannya yang berjudul : Memperkuat Peran Pemerintah Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan, Jurnal : Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), Volume 8 No.1 Juni 2020, hal 1-20. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tentang memerlukan perhatian dan komitmen dari semua aktor termasuk pemerintah daerah, yaitu pemerintah sebagai pemangku kepentingan menjalankan program dan perencanaan dengan melakukan kerjasama dengan stakeholder dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Persamaan dengan penulis dari hasil penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan, namun ada perbedaannya yaitu jika dalam jurnal ini hasil penelitian yang didapat adalah bahwa peran pemerintah dalam menjalankan tugasnya adalah melakukan kerjasama dengan stakeholder dan dengan cara menumbuhkan partisipasi masyarakat, sedangkan dari penulis ada 7 peran yang dilakukan

oleh pemerintah yaitu peran sebagai koordinator, peran sebagai perencana, peran sebagai pembuat kebijakan atau undang-undang, peran sebagai pengusaha, peran sebagai sebagai stimulus atau pendorong, peran sebagai sebagai pariwisata social dan peran sebagai daya tarik publik.

3. Muhammad Suparmoko, dalam tulisannya yang berjudul : Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. Jurnal : Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol 9 No. 1 April 2020 , hln 39-50. Penelitian ini menggunakan Studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah adalah mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Persamaan penelitian ini adalah sama meneliti peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan, sedangkan perbedaannya adalah peran pemerintah adalah mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan melakukan perbaikan lingkungan yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, hasil penelitian dari penulis adalah bahwa peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan meliputi ada 7 peran sebagai coordinator, peran sebagai perencana, peran sebagai pembuat kebijakan atau undang-undang, peran sebagai pengusaha, peran sebagai sebagai stimulus atau pendorong, peran sebagai sebagai ada 7 peran yang dilakukan oleh pemerintah yaitu peran sebagai coordinator, peran sebagai

perencana, peran sebagai pembuat kebijakan atau undang-undang, peran sebagai pengusaha, peran sebagai sebagai stimulus atau pendorong, peran sebagai sebagai pariwisata social dan peran sebagai daya tarik publik.

Dari ketiga jurnal ini perbedaan utamanya adalah peran pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan, meskipun sama-sama melakukan pembangunan kepariwisataan. Peran Pemerintahan dari hasil penelitian penulis adalah 7 peran yaitu peran sebagai coordinator, peran sebagai perencana, peran sebagai pembuat kebijakan atau undang-undang, peran sebagai pengusaha, peran sebagai stimulasi atau pendorong, peran sebagai sebagai pariwisata sosial dan peran sebagai daya tarik publik.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Peran dari Dinas Pariwisata dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dilihat dari aspek :

- 1 Peran Sebagai Koordinator
- 2 Peran Sebagai Perencana
- 3 Peran Sebagai Pembuat Kebijakan (undang-undang)
- 4 Peran sebagai pengusaha
- 5 Peran stimulasi atau pendorong
- 6 Peran sebagai pariwisata sosial
- 7 Peran Sebagai daya tarik publik

C. Rumusan masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimanakah Peran Dinas Pariwisata dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah

Mendiskripsikan Peran Dinas Pariwisata DIY dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dilihat dari berbagai aspek yaitu peran koordinator, peran perencanaan, peran pembuat kebijakan atau undang-undang, sebagai pengusaha, peran sebagai stimulasi, peran sebagai pariwisata sosial, peran sebagai daya tarik publik.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka memperoleh pemahaman terkait dengan Implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) maka diperlukan beberapa konsep dan teori yang relevan untuk dijadikan dasar dalam menganalisa penelitian ini adalah Peran Pemerintah daerah, implementasi kebijakan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

a. Peran Pemerintah Daerah

Kata Peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dan kata tersebut. Soerjono Soekanto (2010:212) mengatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat (Soekanto, 2010: 243). Apabila konsep tersebut dikaitkan

dengan fungsi pemerintah maka, dapat dikatakan bahwa peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintah daerah di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY

Pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Daerah mempunyai urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelayanan pemerintah yang tidak berkaitan dengan urusan pelayanan dasar atau urusan pilihan. Di bidang pariwisata merupakan urusan pemerintah pilihan, ini dikarenakan mungkin di suatu daerah tidak mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan guna mendukung pembangunan terutama dalam pembangunan perekonomian guna meningkatkan PAD, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, namun hampir semua Provinsi di Indonesia mengembangkan pariwisata.

Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besar adalah menyediakan infrastruktur, memperluas bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antar aparat pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum keluar negeri.

Cooper dan Hall (dalam ilham junaid, 2016:59-60) mengemukakan bahwa pemerintah sebagai sektor publik memiliki tugas atau peran :

1 Peran Koordinasi (*Coordination*) Peran koordinasi ini juga diperuntukkan agar pemerintah bekerja memaksimalkan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* pariwisata untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini, peran koordinasi yang efektif oleh pemerintah akan menunjang penerapan strategi pengembangan pariwisata yang efektif pula.

2 Peran Sebagai Perencana (*Planning*)

Peran perencanaan pemerintah di bidang pariwisata dimaksudkan sebagai peran yang mencakup berbagai aspek dan skala (cakupan), misalnya perencanaan dengan bidang social, ekonomi, pemasaran (promosi) daya tarik wisata, perencanaan lingkungan dan kaitannya dengan pariwisata yang menyangkut pariwisata sebagai motor penggerak ataupun pendukung suatu program.

3 Peran Sebagai Pembuat Kebijakan (Undang-Undang dan Peraturan (*regislation and regulation*)).

Peran pemerintah dalam hal regulasi sangat krusial dalam mengatur efektifitas pariwisata agar pariwisata memberikan

dampak positif lebih besar dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam bentuk implementasi regulasi yang menyangkut masuk dan keluarnya wisatawan ke suatu destinasi perlu diperhatikan, bagaimana regulasi bagi wisatawan ketika berada di destinasi serta regulasi yang menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat dan wisatawan. Regulasi ini juga menyangkut bagaimana kebijakan pelestarian sumber-sumber pariwisata serta regulasi pada industri utama dalam kegiatan pariwisata.

4 Peran Sebagai Pengusaha (*Entrepreneur*)

Pemerintah juga berperan sebagai pengusaha atau pelaku dalam kegiatan pariwisata. Tidak dapat dihindari bahwa banyak kelompok masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menyediakan infrastruktur, (misalnya jalan dan sistem transportasi yang baik), mengelola potensi pariwisata daerah atau destinasi. Namun demikian pemerintah dapat bertindak sebagai pengusaha atau pelaku usaha pariwisata. Hal ini dapat menjadi alternative bagi pemerintah daerah agar promosi kedaerahan dapat dikelola oleh sektor publik dan pemerintah belajar bagaimana mengelola usaha pariwisata selain bertindak dengan sistem birokrasi pemerintahan. Mengingat banyak asset negara yang belum dikelola dengan baik,, maka pemerintah dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia untuk mengelola asset daerah dengan memaksimalkan dan mendorong sebagai pelaku dan karyawan.

5 Peran Sebagai Stimulasi (*Stimulation*)

Peran pemerintah sebagai stimulant yang dijalankan dapat diartikan sebagai upaya mendorong masyarakat (*community*) untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata dalam konteks yang luas. Peran stimulant mempunyai kemsamaan dengan enterprenuer, namun pemerintah memberikan dorongan dalam bentuk pelayanan (*service*) yang diberikan ke masyarakat sebagai contoh, pemerintah memberikan dana ke masyarakat dalam kegiatan penelitian (*research*) yang hasilnya diharapkan memberikan kontribusi positif kepada bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah. Bantuan dana dalam rangka mendukung kegiatan promosi dan pemasaran suatu daya tarik atau destinasi wisata yang merupakan peran stimulasi pamerintah ke masyarakat. Peran stimulasi ini lebih kepada pelayanan yang bersifat tidak nyata (*ingtangible*) baik berupa dukungan lainnya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pariwisata suatu destinasi.

6 Peran Sebagai Pariwisata Sosial (*social tourism*)

Pemerintah dianjurkan untuk melaksanakan perannya dalam mendukung parwisiata sosial (*social tourism*). *Social tourism* diartikan sebagai proses pemberian kesempatan atau peluang ke masyarakat atau pihak-pihak yang secara ekonomis belum mendapatkan kesempatan memperoleh manfaat ekonomis dari aktivitas pariwisata. Dalam suatu destinasi, terdapat kelompok masyarakat yang mengharapkan dapat terlibat dalam kegiatan pariwisata dan memperoleh pendapatan (*income*). Keterbatasan

akan kemampuan dan pengetahuan tentang pariwisata serta bagaimana seharusnya teelibat masih menjadi realita bagi beberapa kelompok masyarakat. Karena itu, pemerintah dengan optimalisasi perannya dalam *social tourism* berarti ada tanggung jawab moral dalam membantu masyarakat.

7 Peran sebagai daya tarik publik (*public interest*)

Peran sebagai pelindung masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah. *Public interest* dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat atau kelompok *non-tourism* untuk terlibat dalam aktivitas pariwisata. Idealnya, kelompok *non-tourism* tersebut juga diajak untuk memahami pariwisata karena pariwisata merupakan multi disiplin atau melibatkan berbagai stakeholde yang ada di suatu detinasi. Namun demikian, pemerintah merupakan actor utama dalam menjalankan peran *public interest* tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pasal 4 di katakan bahwa kepariwisataan bertujuan: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapuskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Berdasarkan pasal tersebut di atas jelas bahwa negara sangat berkepentingan untuk membangun industri pariwisata seutuhnya. Adalah wajar jika inisiasi pembangunan pariwisata dilakukan oleh pemerintah. Mengingat industri

ini dapat memberikan kontribusi ekonomi yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat di sekitar obyek wisata melalui jasa pemandu, fotografer, penyedia makanan dan minuman, akomodasi, hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, penyedia souvenir, penyedia jasa transportasi, penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggara kegiatan MICE (*Meeting, incentive, conference, and exhibition*), jasa informasi pariwisata, jasa *travel agency*, jasa konsultan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak seperti perbankan, asuransi dan keamanan (Judisseno, 2017:62-63).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa peran pemerintah sebagai inisiator pembangunan pariwisata. Bahwa kebijakan pembangunan pariwisata adalah dominan pemerintah . Kepariwisataan tidak mungkin bisa eksis tanpa komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah (Judisseno, 2017: 66).

b. Implementasi kebijakan Publik

Kebijakan yang telah dibuat dan disahkan oleh yang berwenang seharusnya dilaksanakan agar capaian tujuan yang diharapkan agar segera terwujud, karena tanpa adanya implementasi maka keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Tahap implementasi kebijakan dapat di cirikan dan di bedakan dengan tahapan pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan yang berbeda, yaitu langsung mengimplemenasikan dengan

program – program atau melalui instruksi untuk suatu tindakan, pelimpahan wewenang, distribusi kewenangan dan lain – lain.

Beberapa definisi tentang implementasi adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi Kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang–undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif atau dekrit presiden dan/atau pernyataan pejabat).
- b. Joko Widodo menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana , dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu maupun kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. (Dewi, 2016:154).

Adapun model yang dipakai untuk menganalisa implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah fokus pada model Goerge Edwrds. Edward meyakini (dalam Nugroho, 2014: 225-226) dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karena itu Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada ke empat isu utama: komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi. .

c. Kebijakan Pembangunan Pariwisata

Mengikuti Undang–Undang No. 10/2009 tentang kepariwisataan, maka ” wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Sementara “Pariwisata” adalah “berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Daerah”, maka “Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidemensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Nugroho, 2018 : 216).

Pariwisata adalah industri yang sangat potensial. Pariwisata saat ini merupakan suatu industri yang sedang berkembang pesat, dalam hal ini pariwisata akan berkembang menjadi salah satu industri yang tumbuh dominan di berbagai belahan dunia. Banyak negara yang mengembangkan industri pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, dari negaranya, karena sektor pariwisata adalah pembangkit usaha ekonomi potensial, dan pembangkit perekonomian suatu negara, kota, provinsi, kabupaten atau daerah tujuan pengunjung.

Pembangunan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu menaikkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pembangunan pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Pembangunan tersebut sangat memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara lain. Kegiatan tersebut menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang. Indonesia

sebagai negara yang sedang berkembang dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang, yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, *alternatife tourism* atau *special interest tourism* dengan obyek dan daya tarik wisata alam.

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1) destinasi; (2) pemasaran; (3) industri, dan (4) kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat memengaruhi semua aspek lain. Pengembangan destinasi dan industri tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemasaran. Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat:

- a. Menjadikannya sebagai destinasi wisata nasional/internasional yang berkelanjutan.
- b. Meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan akan meningkat.

- c. Memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat luas; dan dari ketiga hal tersebut.
- d. Menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif.

Keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak terpisahkan. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolok ukur keberhasilan. Meskipun demikian jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya).

Untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan secara nasional, keempat pilar harus dikembangkan secara terpadu. Meski sampai dengan saat ini jumlah wisatawan masih menjadi ukuran keberhasilan, perlu disadari bahwa keberhasilan pemasaran selain tergantung kepada program pemasarannya sendiri, akan sangat tergantung kepada keberhasilan pengembangan program lain yang menyangkut aspek-aspek yang disebutkan di atas.

Terlepas dari arah kebijakan yang diambil, memperhatikan karakteristik objek dan daya tarik wisata, tradisi masyarakat, dan tuntutan pasar wisata yang dihadapi, maka dalam pengembangan pariwisata Indonesia harus tetap memperhatikan beberapa prinsip yakni;

- a. Prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dari pariwisata itu sendiri,
- b. Prinsip partisipasi masyarakat atau *community based tourism development*
- c. Prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata (*environmental carrying capacity*) agar pengembangan pariwisata di Indonesia tetap dapat dijaga kelestariannya (tourism.binus.ac.id/2017/04/20/4-pilar pembangunan kepariwisataan Indonesia)

d. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti yang disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan (Arida, 2000,: 20).

Pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka

panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil, secara etika dan sosial masyarakat (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995), dalam Nyoman Suarta,dkk, 2017:6).

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mewadahi tujuan – tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitoring dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi (Nyoman Suarta, dkk, 2017: 12).

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 disebutkan bahwa arah pembangunan kepariwisataan adalah meliputi pelaksanaan :

- a. Dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan
- b. Dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan
- c. Dengan tata cara kelola yang baik
- d. Secara terpadu, secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku
- e. Dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat

Menurut Bappenas dalam Nyoman Suarta (2017: 39-40) disebutkan bahwa agenda global mengenai strategi pembangunan nasional

tersebut kemudian dijabarkan ke dalam agenda nasional dan sectoral dalam statregi pembangunan nasional pariwisata ke dalam strategi pembangunan nasional ke dalam bentuk pembangunan yang mensejahterakan rakyat. Isu strategis yang di kedepankan adalah :

1. Pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (*pro poer tourism development*)
2. Berbasis komunitas (*pro community based tourism*)
3. Penyediaan dan penyerapan tenaga kerja (*pro Job*)
4. Peka terhadap kebutuhan dan selera tuan rumah dan wisatawan (*pro host-guest*)
5. Kelestarian lingkungan (*pro environment*)
6. Mencerdaskan komunitas (*pro Knowledge*)

Dimensi dalam pariwisata berkelanjutan berhubungan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, berikut adalah tiga sektor pembangunan pariwisata berkelanjutan (UNEP, 2005) :

- 1 Ekonomi berkelanjutan, ialah memberikan kesejahteraan bagi tingkat yang berbeda bagi masyarakat dan mengatasi efektifitas biaya dalam semua kegiatan ekonomi. Sektor ini sangat penting khususnya bagi kelangsungan hidup, kegiatan, dan kemampuan perusahaan bertahan dalam kurun waktu yang panjang.
- 2 Sosial berkelanjutan, ialah bertanggungjawab terhadap hak asasi manusia dan kesempatan yang sama bagi semua masyarakat. Hal ini menumbuhkan pemerataan manfaat

dengan fokus terhadap pengentasan kemiskinan. Penekanan terhadap masyarakat lokal, mempertahankan dan memperkuat sistem pendukung kehidupan mereka, mengakui dan menghormati budaya dan menghindari segala bentuk eksploitasi.

- 3 Lingkungan berkelanjutan, ialah melestarikan dan mengontrol sumber daya, khususnya sumber daya yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya yang paling penting dalam kehidupan manusia. Di dalamnya termasuk akal untuk meminimalisir polusi udara, tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati dan warisan budaya (<https://ahmadrimba.wordpress.com/2016/10/22>).

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jawabannya secara ilmiah. Di dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang sesuai dan berhubungan dengan inti permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Moleong (2001: 6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta yang tidak menggunakan hipotesa. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Peran Dinas Pariwisata DIY Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan.

c. Subyek Penelitian

Pejabat eselon di lingkungan Dinas Pariwisata DIY.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pariwisata DIY, dengan alasan pemilihan lokasi adalah Dinas Pariwisata DIY merupakan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata, terlebih sejak di undangkannya Undang-Undang Keistimewaan DIY maka sektor pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan di DIY dan merupakan penyumbang PAD terbanyak. Dan Dinas Pariwisata DY menjalankan peranan yang penting dalam pembangunan pariwisata di DIY, Dinas Pariwisata DIY terus bersinergi dengan stakeholder dan komunitas pariwisata dalam mengembangkan dan memajukan dunia pariwisata DIY. Saat ini perkembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah pesat, Komunitas pariwisata ikut melakukan pengembangan pariwisata salah satunya adalah mengembangkan desa wisata. Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak yang berkembang menjadi Desa Wisata yang mandiri dan ada beberapa yang mendapatkan penghargaan seperti Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata

Pentingsari, dua desa wisata tersebut telah melakukan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menuju *quality tourism*

e. Teknik Pemilihan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *Purpose Sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing informan di Dinas Parwisata DIY.

Tabel 1
Daftar Informan dan Jabatan

No	Nama Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan informan
1.	Singgih Raharjo, SH, M.ed	Kepala Dinas Pariwisata DIY	Untuk mengetahui kebijakan pembangunan pariwisata di DIY
2.	Anita Herawati, S.Psi	Sekretaris Dinas Pariwisata DIY	Untuk mengetahui program kerja Dinas Pariwisata DIY
3	Anjar Sulanjari, S.T Par, M. Par	Kasubbag Program	Untuk mengetahui proses perencanaan
4	Dra. Titik Sulistyani	Kepala Bidang Kapasitas	Untuk mengetahui kegiatan Bidang Kapasitas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di desa/kampung wisata
5.	Erni Sri Jarwati, SH	Kepala Seksi Kelembagaan	Untuk mengetahui kegiatan Bidang Kapasitas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan di desa/kampung wisata
6.	Marlina Handayani, S.Pd, M.M	Kepala Bidang Pemasaran	Untuk mengetahui kegiatan Bidang Pemasaran

		Wisata	
7.	Fitri Dyah Wahyuni, SE, MM	Kasie Pembinaan	Untuk mengetahui kegiatan Bidang Indsutri parwisata
8.	Kurinawan, S.Sos, S E AKT, M.EC DEV	Kepala Bidang Destinasi Wisata	Untuk mengetahui pembangunan sarana dan prasarana wisata
9.	Ellya Shari, S.Par, M.M	Kasie Sarana dan Prasarana Wisata	Untuk mengetahui pembangunan sarana dan prasarana di destinasi wisata
10.	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa wisata Nglanggeran, Kab Gunungkidl	Ketua Kelompok	Untuk peran Dinas Parwisata DIY dalam pembangunan keparwiisataan yang berkelanjutan
11.	Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Wisata Pentingsari, Sleman	Ketua Kelompok	Untuk mengetahui peran Dispar dalam pembangunan kepariwisatatan

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak credible, sehingga hasil penelitiannya

tidak bisa dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1). Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dalam menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama selain pancaindra lainnya seperti telinga , penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2007:118).

Selanjutnya menurut Bungin suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

- a) Pengamatan dilakukan peneliti dan telah direncanakan secara serius
- b) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan
- c) Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- d) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.

Penelitian di laksanakan selama 4 bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021, dalam proses penelitian ini penulis

melakukan pengamatan atau observasi terhadap arsip-arsip yang di hasilkan dari kegiatan Dinas Pariwisata DIY berupa laporan kegiatan, hasil kajian yang di laksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY, LAKIP, RENSTRA, makalah dan power point yang digunakan oleh pejabat eselon yang menjalankan tugasnya ketika menjadi narasumber, dan juga pelaporan kegiatan yang dilakukan secara on line yaitu melalui aplikasi sengguh dan website yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata DIY Dalam melakukan observasi dilakukan dengan cara bahan-bahan yang dibutuhkan di Unit kearsipan, Subbagian program, Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas Pariwisata DIY, kemudian di baca dan di pilah-pilah sesuai dengan kebutuhan.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek penelitian. Dengan Kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi (Rahardjo, 2011:3)

Pada hakekatnya wawancara kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Agar wawancara dapat efektif maka, terdapat metode yang harus dilalui yakni : 1). Mengenalkan diri, 2).menjelaskan maksud kedatangan, 3). Menjelaskan materi wawancara, dan 4). Mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010:358).

Ada 2 jenis wawancara yakni :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dapat dilakukan berkali-kali.
2. Wawancara terarah (*guided interview*). Dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup karena peneliti terkait dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku. (Raharjo, 2011: 4).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah (*guided interview*).

Teknik wawancara yang dilakukan adalah melalui wawancara langsung di kantor Dinas Pariwisata DIY, datang ke rumah narasumber yang dimaksud dan juga wawancara secara daring melalui Whatshap.

Dalam wawancara tersebut ditanyakan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Subbagian, Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas Pariwisata DIY.

3) Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. (Raharjo, 2011:5).

Dokumen yang diteliti adalah arsip-arsip laporan kegiatan, hasil kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY, notulen rapat, arsip-arsip foto kegiatan dan juga media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata DIY yaitu Website, Instagram dan youtube.

g. Teknik analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir ke dalam suatu pola, katografi dan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan urutan-urutan dari mencari hubungan diantara dimensi-dimensi urutan (Moleong, 2001:103).

Menurut Huberman dan Miles dalam Idris (2019:71) mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif Model ini terdiri dari 3 tahap :

- 1 Tahap Reduksi data, yang dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul ke dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Bagi peneliti kualitatif, kegiatan reduksi menjadi sangat penting karena yang

bersangkutan dapat mulai memilih dan memilah data mana dan data dari siapa yang harus lebih dipertajam.

- 2 Display data, yang mana sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses model interaktif.
- 3 Verifikasi dan penarikan kesimpulan, tahap ini adalah akhir dari proses pengumpulan data , yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada dalam masyarakat).

h. Keabsahan Data

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan napa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti datanya valid, sehingga semakin kredibel atau dapat dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dengan tujuan adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan tesis ini sesuai dengan napa yang dimaksud sumber data atau informan.

Dalam penelitian yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata, setelah dilakukan wawancara baik dilakukan secara langsung maupun secara daring, maka hasil wawancara tersebut di salin ke dalam bentuk transkrip wawancara. Dan jika terjadi perbedaan pendapat dalam satu permasalahan yang ditanyakan maka dilakukan croscek, juga data yang di dapat dari laporan kegiatan maka akan di tanyakan kepada Seksi yang membuat laporan, begitu pula data yang di dapat dari media sosial yang di miliki Dinas Pariwisata DIY.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Profil Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

Saat ini, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat menjadi 8% dari PDB, sebuah target yang ambisius (mungkin terlalu ambisius) yang mengimplikasikan bahwa dalam waktu 4 tahun mendatang, jumlah pengunjung perlu ditingkatkan dua kali lipat menjadi kira-kira 20 juta. Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah akan berfokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi online (marketing) di luar negeri. (Indonesia-investment.com).

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan pariwisata nasional dua kali lipat pada tahun 2019, pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi PDB nasional sebesar 8 % , devisa yang dihasilkan 280 trilyun, menciptakan lapangan kerja dibidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, jumlah kunjungan wisata 20 juta dan pergerakan wisnus 275 orang serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia. (Syakdiah, 2017).

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang terkemuka yang sudah dikenal baik tingkat nasional maupun dunia setelah Bali, memiliki banyak potensi wisata berupa keindahan alam, budaya dan kearifan lokal yang layak menjadi potensi wisata yang berdaya saing.

Kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 5 Kabupaten/kota masing-masing mempunyai keistimewaan dan keunggulan sendiri-sendiri namun ciri khas dari pariwisata di Yogyakarta adalah kekuatan pada kebudayaannya. Sebagai peninggalan suatu kerajaan besar yang sampai sekarang masih ada yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memberi warna tersendiri bagi Yogyakarta dengan keramah tamahan dan peninggulan situs-situs budaya peninggalan jaman dahulu menambah daya tarik bagi Yogyakarta.

Undang-Undang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 yang telah dimiliki DIY, semakin memantapkan posisi dan peran penting DIY dalam menjaga, mempertahankan dan mengembangkan kekayaan budayanya, baik ditingkat nasional maupun internasional.

Yogyakarta disamping dikenal sebagai kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan alamnya dan budayanya, hingga sekarang Yogyakarta masih tetap merupakan daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan Mancanegara. Dengan kesungguhan untuk mencapai kelestarian alam dan lingkungan yang berkelanjutan. (Dinas Pariwisata DIY, 2020).

Potensi wisata yang dimiliki Yogyakarta sangatlah beragam mulai dari candi-candi seperti Candi Prambanan dan Ratu Boko, Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakulaman, Kota tua Kotagedhe, Makam Rajaraja Mataram di Kotagedhe, museum-museum, dan adat-istiadat serta kesenian yang keberadaannya masih dijaga dan terus dilakukan sampai saat ini. Begitu pula dengan potensi wisata berupa keindahan alamnya

seperti kawasan wisata Kaliurang, Hutan bunder, Nglanggeran yang juga dikenal dengan gunung api purba, desa wisata dan kawasan pantai Gunungkidul dan kawasan wisata Bukit Menoreh di Kulon Progo.

Disamping itu beberapa fasilitas pendukung telah juga dibangun seperti akomodasi, restoran/rumah makan, telekomunikasi, tempat hiburan toko souvenir, sentra oleh-oleh dan fasilitas pendukung lainnya.

Tabel 2 jumlah obyek wisata di Yogyakarta. :

Nama Obyek Wisata	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jenis Obyek Wisata Marina	13	15	15	17	17
Jenis Obyek Wisata Tirta	4	6	7	8	-
Jenis Obyek Wisata Sejarah	17	17	17	17	-
Jenis Obyek Wisata Alam	12	17	17	17	-
Jenis Obyek Wisata Museum	30	30	30	31	-
Jenis Obyek Wisata Desa Wisata	59	62	67	67	-
Jenis Obyek Wisata lainnya	13	15	21	21	-

Sumber : diolah dari aplikasi dataku Bappeda DIY tahun 2021

Destinasi Pariwisata DIY adalah sebagai berikut :

- A.Kawasan Kaliurang Merapi dan sekitarnya.
- B.Kawasan Prambanan Ratu Boko dan sekitarnya.
- C.Kawasan Perkotaan Malioboro dan sekitarnya.
- D.Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya.
- E.Kawasan Parangtritis Depok dan sekitarnya.
- F.Kawasan Karst Wonosari dan sekitarnya.
- G.Kawasan Kasongan-Tembi dan sekitarnya.
- H.Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya.
- I.Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.
- J.Kawasan Bobung-Putat dan sekitarnya.

K.Kawasan Sermo-Menoreh-Suroloyo dan sekitarnya.
(BappedaJogjaprov.go.id)

Potensi wisata yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta Potensi Wisata berupa wisata alam dan wisata budaya, ke dua potensi wisata tersebut merupakan asset yang sangat berharga dan mempunyai ciri khas tersendiri, unggulan yang lain yaitu berupa wisata budaya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat kental akan budaya. Yogyakarta terkenal memiliki banyak sekali Wisata Budaya di Yogyakarta yang menarik banyak perhatian wisatawan karena hingga saat ini masih tetap dilestarikan. Jika berlibur ke Yogyakarta, wisata budaya yang ada di Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Keraton Yogyakarta
2. Tamansari
3. Museum Ullen Sentalu
4. Museum Batik
5. Candi Prambanan
6. Kotagedhe
7. Desa Wisata Tembi
8. Museum affandi
9. Masjid Gede Kauman

Sedangkan wisata alam alam di Yogyakarta terus dikembangkan dengan di berbagai tempat, obyek wisata alam yang indah kemudian dikemas sedemikian rupa dengan menambah beberapa fasilitas yang menarik untuk membuat dokumen pribadi misalnya Heha Sky view Gunung Kidul, Agro wisata Bhumi Merapi, Puncak Segoro Gunungkidul, Grojogan sewu

Watu Banyurejo Sleman, dan masih banyak lagi wisata alam yang ada dan dikembangkan oleh investor dan Dinas Pariwisata DIY.

B. Profil Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pariwisata DIY merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus kepariwisataan di DIY. Dinas Pariwisata DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata DIY memiliki tugas untuk melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut sesuai dengan BAB III Pasal 5 Perda No. 58 Tahun 2018 :

1. Penyusunan program kerja dinas
2. Perumusan kebijakan teknis bidang destinasi, industri Pariwisata, kapasitas dan pemasaran Pariwisata
3. Fasilitasi pengelolaan daya wisata, kawasan strategis, industry dan pemasaran pariwisata
4. Pelaksanaan kerjasama lintas sectoral dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, industry dan pemasaran pariwisata
5. Pelaksanaan pemasaran destinasi, daya tarik wisata dan kawasan strategis pariwisata
6. Pelaksanaan analisis untuk pengembangna pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata

7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi, industry, kapasitas dan pemasaran
8. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan pariwisata
9. Pengembangan Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata
10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi, industri, kapasitas dan pemasaran
11. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
12. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
13. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
14. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dinas Pariwisata DIY mempunyai Visi dan Misi untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun Visi dan Misi Dinas Pariwisata mengacu Visi dan Misi Gubernur DIY 2017-2022

VISI:

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.”

MISI “Pancamulia”:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui

- peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal, untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
 3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama, baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
 4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
 5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata DIY

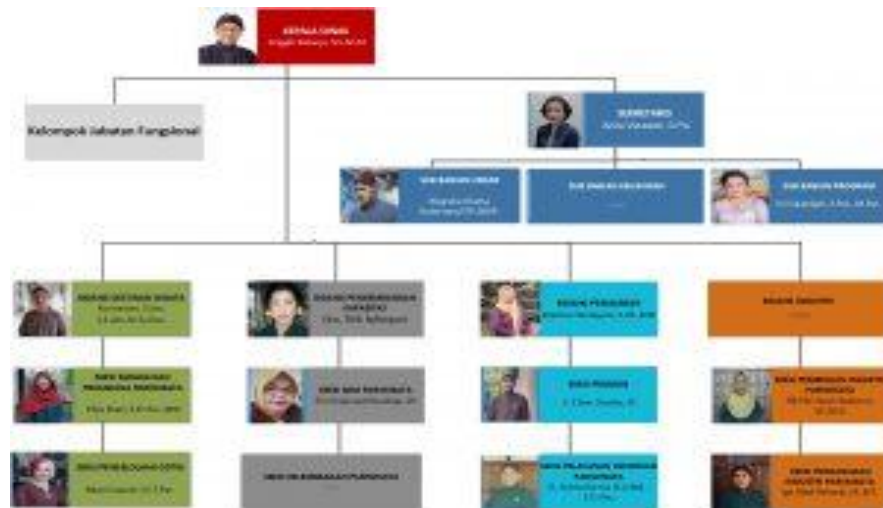
VISI:

“Terwujudnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2025 berdasarkan keunggulan produk wisata yang berkualitas, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.”

MISI:

1. Mewujudkan destinasi pariwisata DIY yang berbasis budaya, lingkungan, kreatif dan inovatif, maju berkembang dan mampu menggerakkan peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi seluruh masyarakat DIY untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka dibentuk susunan organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, adapun struktur Organisasi Dinas Pariwisata DIY adalah sebagai berikut :



Sumber : Vistingogja.com

Adapun uraian tugas dari masing-masing bidang dan seksi yang ada di Dinas Pariwisata DIY adalah sebagai berikut :

- 1 Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sekretariat
 - b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
 - c. Penyusunan Program Dinas
 - d. Pengelolaan Keuangan Dinas
 - e. Penyelenggaraan Kepegawaian Dinas
 - f. Pelenggaraan kerumahtanggan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas

- g. Pelaksanaan program administrasi perkantoran
 - h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi
 - i. Pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis.
 - j. Pelaksanaan program administrasi perkantoran
 - k. Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - l. Pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan
 - m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- 2 Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan data informasi. Sedangkan Subbagian Program mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Subbagian Program
 - b. Penyusunan rencana program Dinas
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata
 - d. Pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi di bidang pariwisata
 - e. Pemantauan dan pengendalian program bidang pariwisata

- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas
- g. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi bidang pariwisata
- h. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbagian program
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

3 Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan. Sedangkan Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Keuangan
- b. Pengelolaan keuangan Dinas
- c. Pelaksanaan pendapatan Dinas
- d. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas
- e. Pelaksanaan verifikasi anggaran Dina
- f. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas
- g. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

4 Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtangan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Umum
 - b. Pengelolaan data kepegawaian Dinas
 - c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas
 - d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas
 - e. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas
 - f. Penyelenggaraan rumah tangga Dinas
 - g. Pengelolaan barang Dinas
 - h. Penyelenggaraan kehumasan Dinas
 - i. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas
 - j. Pengelolaan kearsipan Dinas
 - k. Penyiapan bahan ketatausahaan Dinas
 - l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbag
Umum
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsi Dinas.
- 5 Bidang Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan lama waktu tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara. Sedangkan Fungsi dari Destinasi Wisata adalah sebagai berikut :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Destinasi Wisata
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan
Destinasi Wisata
 - c. Penyusunan teknis operasional pengelolaan destinasi
wisata DIY
 - d. Pengelolaan destinasi wisata DIY

- e. Pengembangan destinasi wisata
 - f. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang Pengembangan Destinasi Wisata
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
- 6 Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas meningkatkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Untuk melaksanakan tugasnya maka Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - b. Penyiapan fasilitas kebijakan teknis pengelolaan obyek dan daya tarik wisata
 - c. Pelaksanaan pendataan dan identifikasi potensi obyek dan daya tarik wisata
 - d. Penyiapan pengembangan obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten/Kota
 - e. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata
 - f. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata secara terpadu
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

7 Seksi Sarana Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Seksi Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program Kerja Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
- b. Penyiapan fasilitas kebijakan teknis sarana prasarana wisata
- c. Pengelolaan data sarana dan prasarana pariwisata
- d. Fasilitas pembangunan sarana prasarana pariwisata
- e. Pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata
- f. Pelaksanaan dekonsentrasi dana atau tugas pembantuan
- g. Pembinaan dan penyuluhan pemanfaatan sarana prasarana pariwisata
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Penunjang Pariwisata
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

8 Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata untuk meningkatkan jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Industri Pariwisata
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Industri Pariwisata

- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan industri pariwisata pariwisata
- d. Pengelolaam industri pariwisata
- e. Penyembangan industri pariwisata
- f. Fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata
- g. Pembinaan dan pengawasan industri pariwisata
- h. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pembinaan Industri Pariwisata
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

9 Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri pariwisata. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Industri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Industri pariwisata
- b. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan industry pariwisata
- c. Pengelolaan data industri pariwisata
- d. Pengembanagan industri parwisata
- e. Penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama indsutri pariwisata
- f. Fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata
- g. Pembinaan industri parwisata

- h. Pemantaun, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pembinaan Industri Pariwisata

10 Seksi Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengawasan industri pariwisata, Untuk melaksanakan tugasnya, maka Seksi Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi Pengawasan Indsutri Pariwisata
- b. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan indsutri parwisata
- c. Penyiapan bahan pemantauan industri pariwisata
- d. Identifikasi dan inventarisasi data pengawasan industri pariwisata
- e. Pemantauan dan evaluasi produk industri parwisata
- f. Pengkajian tindaklanjut hasil pengawasan industri parwisata
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pengawasan Industri Pariwisata
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

11 Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata

Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata mempunyai fungsi melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan parwisata untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Kapasitas Parwisata
- c. Pengelolaan data sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata
- d. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang keparwisataan
- f. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- g. Pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

12 Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan Pembinaan sumber daya manusia pariwisata.

, maka Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata
- b. Penyiapan Fasilirasi kebijakan teknis sumber daya manusia pariwisata
- c. Pengelolaan data sumber daya manusia pariwisata
- d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata

- e. Pembinaan dan pemberdayaan duta wisata
- f. Fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Sumber Daya Manusia pariwisata
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

13 Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kelembagaan kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas pengelolaan lembaga kearsipan, maka Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Seksi Kelembagaan Pariwisata
- b. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kelembagaan pariwisata
- c. Pengelolaan data kelembagaan pariwisata
- d. Penyiapan bahan pengembangan kelembagaan pariwisata
- e. Pemberdayaan masyarakat pariwisata
- f. Fasilitasi pembentukan kelompok/lembaga usaha pariwisata
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan seksi kelembagaan pariwisata
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

14 Bidang Pemasaran Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan jumlah

wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Untuk melaksanakan tugas, maka Bidang Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemasaran
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata
- c. Pengelolaan data pemasaran pariwisata
- d. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri
- e. Pengelolaan pusat informasi pariwisata
- f. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- g. Pelaksanaan pengembangan pencitraan (*branding*)
- h. Pelaksanaan pengembangan promosi terintegrasi (*online dan offline*)
- i. Pelaksanaan pengembangan kemitraan pariwisata
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemasaran Pariwisata
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

15 Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Seksi Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Promosi Pariwisata
- b. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis promosi pariwisata
- c. Pengelolaan data promosi pariwisata
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan promosi pariwisata

- e. Penyelenggaraan promosi pariwisata terpadu
- f. Pengkajian pasar promosi pariwisata
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Promosi Pariwisata
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

16 Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi pariwisata. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata
- b. Penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengelolaan informasi pariwisata
- c. Penyiapan bahan informasi pariwisata
- d. Pelayanan informasi pariwisata
- e. Pelayanan informasi pariwisata
- f. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pencitraan (*branding*)
- g. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsi Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya tentu saja disusun program kerja Dinas Pariwisata DIY sesuai tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Seksi.

Program kerja tersebut disusun dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata DIY yang telah disusun. Berikut adalah Program kerja Dinas Pariwisata DIY tahun 2021

Tabel 3
Program Kerja Dinas Pariwisata DIY
Tahun 2021

No.	Sekretariat Bidang/Seksi	Kegiatan
1.	<p>Sekretariat</p> <p>1 Subbagian Program</p> <p>2 Subbagian Keuangan</p> <p>3 Subbag Umum</p> <p>Bidang Destinasi Pariwisata Program : Program Peningkatan Daya Tarik Obyek Wisata :</p>	<p>1. Pembuatan Renstra Dinas Pariwisata DIY</p> <p>2. Pembuatan Renja Dinas Pariwisata DIY</p> <p>3. Pembuatan Laporan Tahunan Kegiatan Dinas Pariwisata DIY</p> <p>1. Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Dinas Pariwisata DIY</p> <p>2. Penyelenggaraan Akutansi Pengelolaan Keauanga</p> <p>3. Pengelolaan SPJ Dnas Pariwisata DIY</p> <p>1. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Taman</p> <p>2. Pemeliharaan jaringan Isirik, telpon dan internet</p> <p>3. Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor</p> <p>4. Pemelihraan Kendaraan dinas</p> <p>5. Pengadaan alat tulis kantor</p> <p>6. Pemeliharaan dan Pengelolaan Arsip Dinamis</p> <p>7. Kegiatan Penyusutan arsip</p>

	<p>1 Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata</p>	<p>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Atraksi wisata 180 event 2 Bakti Saka Pramuka 3 Pembinaan dan Pendampingan Dimas Diajeng 4 Pemeran Sekaten 5 Pentas Kesenian di TIC Malioboro, TIC Stasiun Tugu, dan TIC Bandara 6 Sapa Aruh Pranatan Anyar Plesiran Jogja 7 Pawai dan Pameran Pembangunan 8 Ngayogjazz 9 Management event 10 Bergodo keprajuritan Kraton 11 Lomba burung 12 Lomba Jemparingan 13 Festival Andong 14 Keoncong Kotagede 15 Jelajah Alam Mangunan Imogiri 16 Jogja Tourims Day 17 Festival desa wisata
	<p>2 Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata</p>	<p>Pengelolaan Destinasi Pariwisata : Perencanaan Destinasi Pariwisata Potensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DED desa Gayamharjo, Prambanan, Sleman 2. DED desa wisata Gamplong, Moyudan, Sleman 3. DED desa wisata Sempu, Wonokerto, Turi, Sleman 4. DED Sambiharjo, Prambanan, Sleman 5. DED pengembangan kampong wisata di Kota Yogyakarta 6. DED pengembangan Wisata kawasan Dlingo-Piyungan Bantul 7. DED pengembangan Wisata kawasan Imogiri 8. DED Pengembangan wsiata kawasan Samigaluh-Girimulyo, Kulon Progo 9. DED Pengembangan

	<p>wisata kawasan Semin, Gunung Kidul</p> <p>10. DED pengembangan wisata kawasan Ngemplak-Ngaglik, Slema</p> <p>11. DED pengembangan wisata kawasan Patuk, Gunung Kidul</p> <p>12. DED Sub Kawasan Wanawisata budaya Mataram, DIngo, Bnatul</p> <p>13. Feasibility Study Bukit Turgo, Purwobingun, Pakem, Sleman</p> <p>14. Feasibility Study Pantai Wediombo, Jepitu, Girisubo, Gunungkidul</p> <p>15. Feasibility Studi pengembangan potensi wisata kawasan Gondokusuman</p> <p>16. Feasibility studi pengembangan Potensi wisata kawasan Trgalrejo</p> <p>17. Feasibility studi potensi wisata Jati Larangan-Taman Sengon, Guwosari, Pajangan, Bantul</p> <p>18. Masterplan desa Desa Guwosari, Pajangan, Bantul</p> <p>19. Masterplan desa wisata pantai klayar, Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul</p> <p>20. Masterplan di Kab. Sleman</p> <p>21. Masterplan di Wonokerto, Turi, Sleman</p> <p>Bidang Industri Pariwisata Program : Program Peningkatan Daya Tarik Obyek Wisata :</p> <p>1 Seksi Pembinaan Industri Parwisata</p> <p>2 Seksi Pengawasan Industri Pariwisata</p>	<p>Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata : Sertifikasi Usaha Jasa Parwiisata 4 UJP</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata (UJP) :Pengawasan terhadap 8 UJP</p>
--	---	--

	<p>Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata Program : Program Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi kreatif Tingkat Lanjut</p> <p>1 Seksi Sumber Daya Manusia</p> <p>2 Seksi Kelembagaan Pariwisata</p>	<p>Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat lanjutan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap desa wisata agar naik kelas. b. Jumlah POKDARWIS yang meningkat kapasitasnya melalui lomba desa/kampung wisata, pokdarwis dan homstya c. Pelatihan dan kemitraan kelembagaan pelaku pariwisata d. Pelatihan pengelolaan desa wisata e. Pelatihan dan pengelolaan usaha homestay/pondok wisata <p>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Forum Komunitas Lintas Sektor b. Kemitraan yang dilakukan antara desa wisata dengan hotel c. Publkasi TV/talkshow d. Sosialisasi Perda Pramuwisata e. Sosialisasi Pegub Desa Wisata f. Sosialisasi Sadar Wisata g. Pelatihan digitalisasi : branding pemasaran,dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir,
--	--	---

	<p>Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Parwisata 1 Seksi Promosi Wisata</p>	<p>h. Festival Desa Wisata i. Gelar Potensi dan Pesona desa wisata j. Sosialisasi Pranatan Anyar Plesiran Jogja</p> <p>Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pemandu wisata alam 2. Pelatihan Pemandu wisata buatan 3. Pelatihan Pemandu wisata budaya 4. Pelatihan Peningkatan inovasi dan higienis sajian kuliner di Destinasi Wisata <p>Peningkatan Lembaga Wisata Budaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kajian Desa Wisata 2 Gelar Pranatan Pleiran Anyar di desa Wisata 3 Pelatihan dan Sertifikasi pemandu sejarah 4 Pelatihan kuliner SDM homestay di Desa Mandiri Budaya 5 Pelatihan Pemandu keistimewaan di Destinasi Wisata 6 Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya di calon desa mandiri budaya 7 Pendampingan SDM dan Lemabga Wisata Budaya di Calon desa Mandiri Budaya 8 Sertifikasi Tour Planner <p>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kontak bisnis yang dihasilkan dari Jogja Travel Mart b. Jumlah ulasan destinasi wisata dalam familirazation dari jurnalis,
--	---	---

	<p>2 Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata</p>	<p>assosiasi pariwisata dalam negeri, luar negeri dan media.</p> <p>Penyediaan data dan penyebarab informasi pariwisata provinsi, dalam dan luar negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen statistik pariwisata b. Neraca statistik pariwisata c. Penyusunan profil industri pariwisata <p>Publikasi TV/talkshow</p> <p>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi :</p> <p>Penguatan Promos Media Cetak, Elejtronik, dam Media lainnya Dalam dan Luar Negeri.:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan bahan promosi wisata b. Optimalisasi pelayanan TIC di empat lokasi (TIC Bandara dan stasiun, TIC di Malioboro dan Bali) c. Pembuatan Konten promosi multimedia (media cetak, media elektronik/digital, media social d. Pembuatan peta wisata e. Penambahan follower media social dinas pariwisata (instrgram, Facebook, twitter, youtube cannel) : 12.000 follower f. Publikasi media cetak
--	---	--

Sumber : Data diolah dari Rencana Kerja Dinas Pariwisata DIY tahun 2021

Dilihat dari table kegiatan Dinas Pariwisata diatas, bahwa Dinas Pariwisata DIY menyusun Kegiatan yang mencakup segala kegiatan dalam rangka memajukan dan mengembangkan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengembangan destinasi wisata dan kawasan wisata dengan keberagaman potensi alam, budaya dan kearifan

lokal yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk berkinjung di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengembangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan lama kunjung wisatawan atau Length Of Stay (LOS).



Daftar Pustaka

- Bappenas, "Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional" diakses pada www.bappenas.go.id/info-2019 diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta : Kencana
- Dewi, Rahayu Kusuma, 2016, Studi Analisis Kebijakan Publik, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- E. Parlemen, Dinas Pariwisata DIY Jelaskan Implementasi Perda Ripparda DIY diakses dalam dpr.go.id, pada 16 Januari 2022
- Hakim, Lukman , Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional, Jurnal Among Makarti Vol 3 No.5 Juli 2010, hal. 70-78.
- Herlambang Jati Kusumo, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Mulai Berjalan dalam harianjogja.com. diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 18.45 WIB.
- Hermawan, D dan G. Pratidina, Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor, *Jurnal Sosial Humaniora* ISSN 2087-4928 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2015, hal.94-103.
- Idris, Magfirah T, Nurul Umi Ati dan Agus Zainal Abidin, Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang), *Jurnal Respon Publik*, Volume 14 No. 4 tahun 2019, hal. 68-77
- Irawanam Eri, Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Jejaring Admistrasi Publik* Th. VII, Nomor 2, Juli – Desember 2015.
- Judisseno, Rimsky K, 2017, Efektivitas Dan Kompleksitas Kepariwisataaan, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Junaid, Ilham, Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Dan Perencanaan Pariwisata, *Jurnal Kepariwisataaan*, Volume 10, No. 02 Agustus 2016, halaman 50-68.

Kasih Cakaputra Komsary, "Pilar Pembangunan Kepariwisata Indonesia" diakses pada tourism.binus.ac.id/2017/20/4 diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 12.39 WIB

Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

mediaindonesia, pariwisata-tekan-angka-kemiskinan, diakses dalam mediaindonesia.com/nusatantara, pada tanggal 16 Januari 2022.

Moeleong, J. Lexi, 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, iwan, 2019, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Nugroho, riant, 2014, kebijakan public di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017, Pariwisata Berkelanjutan Bali : Cakra Press.

Oka A. Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung : Angkasa

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020 - 2024

Qodriyatun, Sri Nurhayati Q, Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa, Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol.9, No. 2, Desember 2018.

Raharjo, Mudjo, Prof, Dr, Materi Kuliah Penelitian PPs, Universitas Maliki Malang, Juni, 2011

Sentanu, I Gede Eko Putra Sri dan Mahadiansar, Memperkuat Peran Pemerintah Daerah : Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol. 8 No. 1 Juni 2020, hal. 1-20.

Simamora, Rohan Kristin dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik UMA 4 (1), (2016), hal. 79-90.

Suparmoko, Muhammad, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol.9 No. 1 April 2020, hal. 39-50.

Soekmato, Soerjono, 2010, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT. Rajagrafindo

Syakhdiah, Dinamika Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Prosiding Seminra dan Call Paper 20-21 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo – Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Winarno, Budi, 2013, Etika Pembangunan, Jakarta : Pt. Buku Seru